

Pesan Ketua Umum DPN APINDO Menyambut 2018

Seperti apa yang telah dilakukan di sepanjang 2015 dan 2016, Pemerintah di tahun 2017 terus melanjutkan upaya pembuktian kinerja untuk menopang perbaikan ekonomi serta melakukan reformasi struktural. Tantangan eksternal yang masih tidak menentu yang ditambah dengan kejutan indikator ekonomi beberapa kuartal di 2017 yang berada di bawah harapan berbagai pihak menyebabkan target pertumbuhan ekonomi 2017 belum dapat terealisasi. Faktor-faktor optimisme yang sudah mulai terbentuk nampaknya mulai sedikit bergeming memasuki tahun 2018 ini ditengah situasi ketidakpastian global yang masih mengemuka, dan ditambah dengan arah perbaikan ekonomi nasional yang masih belum sejalan dengan upaya reformasi struktural, terutama memasuki periode pilkada di tahun 2018 serta pesta demokrasi kepemimpinan nasional pada 2019 mendatang.

Dinamika sepanjang tahun 2017 memberikan berbagai fenomena menarik, terutama perkembangan indikator konsumsi yang sempat membingungkan berbagai pihak dan kalangan. Stagnasi indikator konsumsi inilah yang menyebabkan perkembangan ekonomi 2017 kita secara agregat masih belum dapat beranjak naik dari tren yang telah dicapai sebelumnya di tahun 2016. Namun, relatif stabilnya indikator-indikator makro ekonomi Indonesia di sepanjang 2017 cukup membantu untuk "*menenangkan*" keadaan. Relatif terjaganya tingkat inflasi rata-rata di bawah 4,00% serta fluktuasi nilai tukar Rupiah selama tahun 2017 yang lebih stabil telah berperan untuk memberi sentimen pasar yang positif, setelah sebelumnya gejolak depresiasi Rupiah telah terlebih dahulu terbentuk di tahun 2015 dan 2016. Setelah pencapaian hasil pertumbuhan kuartal I dan kuartal II 2017 yang tidak terlalu menggembirakan banyak pihak, berbagai kalangan mulai pesimistis terhadap tercapainya target pertumbuhan agregat 2017 sesuai target APBN-P 2017. Tidak hanya bagi Pemerintah, realisasi-realisis indikator makro 2017 pun masih belum mampu memenuhi harapan dunia usaha.

APINDO juga mengapresiasi kebijakan moneter Bank Indonesia melalui instrumen *7-Day Repo Rate* yang di awal tahun 2017 berada di level 4,75% untuk kemudian diturunkan ke level 4,50% dan kemudian kembali diturunkan menjadi

4,25%. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan moneter BI adaptif terhadap perkembangan kondisi ekonomi yang ada. Tindak lanjut berikutnya yang dibutuhkan dunia usaha adalah kebijakan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk dapat menstimulasi perbankan komersial domestik dalam memperbesar pemberian kredit kepada sektor-sektor usaha produktif. Kondisi neraca perbankan saat ini masih diperberat dengan semakin besarnya Non Performing Loan (NPL) dari kredit untuk sektor konsumtif. Perlunya peralihan paradigma pemberian kredit perbankan kepada sektor-sektor produktif pada akhirnya tidak hanya memperbaiki kinerja neraca keuangan perbankan secara umum, tetapi juga akan memberi ruang bagi dunia usaha domestik, khususnya UMKM, untuk mengajukan pinjaman dari perbankan domestik agar tidak berupaya mencarinya dari sumber-sumber kreditur luar negeri, yang tentunya dapat menjaga faktor resiko terhadap neraca transaksi berjalan Indonesia.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi 2016 dan 2017 yang masih di bawah target Pemerintah sempat melandasi revisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi 2018 dari berbagai lembaga nasional maupun internasional, termasuk proyeksi APINDO sebesar maksimal 5,20% yang berada di bawah target pertumbuhan 2018 dalam APBN 2018 sebesar 5,40%. Kecuali indikator belanja Pemerintah (G) dan Konsumsi Rumah Tangga (C) yang diperkirakan belum akan mengalami lonjakan yang signifikan di tahun 2018, maka harapan Pemerintah dan pelaku usaha masih terletak pada kelanjutan perbaikan indikator Investasi (I) dan Perdagangan Internasional (Net Ekspor) kita. Jatuh bangun upaya Pemerintah untuk memaksimalkan perkembangan Investasi melalui perbaikan iklim usaha tidak akan pernah terlepas dari kelanjutan reformasi birokrasi yang terus konsisten dilakukan Pemerintah untuk mengontrol regulasi-regulasi baru yang hanya menghambat kinerja dunia usaha dan investasi. Untuk regulasi di tingkat pusat, Inpres No. 7/2017 telah menjawab kebutuhan tersebut untuk mengatur tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan sehingga setiap Peraturan Menteri (Permen) yang dikeluarkan benar-benar ditujukan untuk menunjang iklim investasi dan dunia usaha yang sehat. Di tingkat regulasi daerah, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada April 2017 yang menganulir kewenangan

Eksekutif untuk membatalkan Perda-Perda bermasalah tentunya menjadi faktor yang memperberat upaya Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan adanya keputusan MK tersebut, APINDO berharap agar koordinasi intensif antara Pusat dan Pemda beserta DPRD terus dilakukan secara preventif untuk dapat menghasilkan regulasi-regulasi daerah yang pro investasi dan ramah terhadap pengembangan dunia usaha.

Seperti halnya perkembangan peta politik secara global, APINDO juga tetap mencermati kelanjutan peta politik nasional dan daerah memasuki tahun 2018 yang akan menyelenggarakan ratusan Pilkada serentak sebagai kelanjutan pelaksanaan dari sebagian Pilkada serentak yang telah dilaksanakan di awal 2017. Dalam konteks global, ketidakpastian situasi di Semenanjung Korea, perkembangan kondisi Timur Tengah pasca pernyataan Presiden AS Donald Trump terkait konflik Israel-Palestina, perkembangan terakhir pasca Brexit, serta dinamika-dinamika politik global lainnya masih menjadi faktor-faktor pertimbangan yang cukup pelik bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam menetapkan arah kebijakan ekonomi yang akan dituju di 2018. Sementara itu di dalam negeri, Pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan Pilkada serentak 2018 yang dapat meminimalisir gejolak sosial serta mampu menghasilkan Kepala-Kepala Daerah baru yang berkarakter sejalan dan seiring dengan kebijakan pusat, dengan kata lain pro investasi dan pengembangan iklim usaha serta penyediaan lapangan kerja. Pelaksanaan Pilkada 2015 yang tenang dan lancar dapat dijadikan contoh dan pedoman yang tepat bagi pelaksanaan dan pengawalan Pilkada 2018 yang aman dan lancar. APINDO berharap kegaduhan Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu tidak berlanjut dalam Pilkada-Pilkada 2018 sehingga diharapkan mampu memberikan suasana kegiatan usaha yang kondusif bagi dunia usaha.

Sementara itu, di lingkup internasional, APINDO mengapresiasi upaya pemerintah di sepanjang 2017 dalam memperluas kerjasama perdagangan bilateral dan regional. Arah kebijakan pemerintah tidak terbatas hanya pada perluasan akses pasar tapi juga mengarah pada diversifikasi pasar. APINDO mencatat terdapat berbagai kerjasama perdagangan yang sedang dirundingkan dengan berbagai negara seperti Chile, negara-negara EFTA, Turki, Iran, dan negara-negara rekanan ASEAN melalui

perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP), ASEAN-Hongkong dan ASEAN-Kanada. APINDO aktif terlibat dalam perundingan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA) yang telah berlangsung dengan baik, juga berharap tercapainya percepatan kesepakatan perundingan kerjasama perdagangan dalam skema Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership (IEU CEPA) untuk menjamin akses pasar dengan preferensi yang terbaik bagi pelaku usaha Indonesia, memacu percepatan peningkatan standar kualitas produk Indonesia dan sekaligus sebagai *trigger* terhadap pencapaian kinerja ekspor yang semakin baik hingga saat ini. Namun pemerintah harus tetap memperhatikan masukan-masukan dari pelaku usaha, khususnya APINDO, agar poin-poin perundingan tidak menjadi blunder yang dapat merugikan kinerja ekspor industri domestik di masa mendatang. Di samping itu, diperlukan juga edukasi bagi pelaku usaha untuk memahami dan mendapatkan manfaat FTA.

Di bidang pembangunan Energi Berkelanjutan, permasalahan kurang menariknya investasi di bidang energi telah diakui banyak pihak. Dan Pemerintah mengantisipasinya dengan beberapa kebijakan yang diformulasikan untuk memberikan tingkat pengembalian modal yang lebih kompetitif dalam bentuk wacana insentif untuk sektor migas dan *feed-in tariff* untuk Energi Baru dan Terbarukan (EBT). APINDO mencermati yang tidak kalah pentingnya dengan tingkat pengembalian modal adalah faktor kepastian usaha. Pelaku usaha akan sulit memberikan justifikasi investasi apabila kebijakan ternyata berganti-ganti akibat pergantian pejabat. Kesulitan untuk justifikasi tersebut sangat beralasan, apalagi investasi di sektor ESDM bersifat jangka panjang hingga puluhan tahun. Kebijakan Pemerintah yang dikeluarkan disaat awal investasi dilakukan dapat bertolak belakang / berubah total dengan kebijakan Pemerintah 5-10 tahun kemudian. Indonesia pun mau tidak mau harus mengarah cepat ke model tata kelola sektor energi yang berhasil dikembangkan berbagai negara. Ketahanan energi nasional saat ini bukan lagi sekedar jargon yang dapat dimonopoli pemerintah, namun harus menyertakan peran dan masukan aktif investor dan dunia usaha. APINDO tidak akan pernah meragukan regulasi Pemerintah sepanjang kebijakan energi dan

implementasinya mulai saat ini dijauhkan dari kepentingan politik sesaat.

APINDO mengapresiasi akan semakin kondusifnya situasi penetapan Upah Minimum (UM) 2018 yang berlangsung di akhir 2017 dalam suasana yang aman dan tertib, relatif bila dibandingkan dengan akhir 2015 dan 2016 dalam hal penetapan UM untuk tahun berikutnya. Situasi kondusif tersebut tidak terlepas dari kekuatan faktor kepastian yang dimiliki PP 78/2015 dalam hal penetapan UM, yang telah sesuai dengan tujuan penciptaan regulasi itu sendiri yaitu untuk menciptakan kepastian dan stabilitas iklim usaha dan investasi, yang tentunya diharapkan dapat memperbaiki produktivitas pekerja. Dunia usaha mengapresiasi sekaligus mencermati kebenaran laporan Kemenaker yang menyebutkan bahwa kenaikan UMP 2018 di seluruh provinsi sudah sesuai dengan PP 78/2015.

Perkembangan pola produksi secara global maupun di kawasan memperlihatkan transisi alat-alat produksi yang mulai beralih ke pola mekanis maupun *digital (otomatisasi)*, terutama dalam sektor-sektor usaha berskala menengah-besar. Mulai bergesernya pola produksi tersebut harus dapat diantisipasi dengan cepat, terutama untuk negara seperti Indonesia yang berkarakter demografis mayoritas penduduk usia produktif. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi Pemerintah, dunia usaha dan serikat pekerja tidak boleh hanya berfokus pada dilematis penetapan UM dari tahun ke tahun dengan segala polemik yang menyertainya, yang justru semakin tidak kondusif terhadap perkembangan dunia usaha. Realita nyata sedang berlangsung, otomatisasi semakin menjadi pilihan pelaku industri, dan para pihak tripartit harus cepat mengantisipasinya. *Link and match* antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha, yang diiringi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan *vocational training* agar keterampilan pekerja dapat memenuhi kebutuhan industri yang sedang bertransisi ke pola digitalisasi dan otomatisasi. Apabila respon kita berjalan lambat, maka Indonesia tidak dapat menghindari lonjakan tingkat pengangguran di masa mendatang, terutama apabila sektor informal ternyata tidak mampu menampung perpindahan tenaga kerja yang tidak tertampung oleh industri di sektor formal akibat fenomena transisi pola produksi tersebut. APINDO selalu mencermati perkembangan ini dan mengharapkan agar percepatan penyediaan infrastruktur *vocational*

training di beberapa waktu terakhir agar semakin diintensifkan untuk meminimalisir kondisi *missmatch*, yang diiringi dengan pemerataan realisasi investasi ke luar Jawa sehingga Jawa tidak menanggung beban tingkat pengangguran yang semakin berat.

Dalam hal perpajakan, APINDO memberikan apresiasi terhadap kesuksesan pelaksanaan *Tax Amnesty (TA)* selama Tahap I, Tahap II, serta Tahap III yang telah berakhir pada 31 Maret 2017 lalu. Amnesti pajak menjadi modal sosial dan jembatan menuju sistem perpajakan baru yang berkeadilan, transparan, akuntabel, dan berkepastian hukum melalui program reformasi perpajakan. APINDO ingin melihat reformasi perpajakan yang dilakukan agar diarahkan menuju sistem perpajakan yang ramah bisnis, dan yang benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus menghindari tumpang tindih pengaturan diantara UU Amnesti Pajak dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain itu, APINDO merekomendasikan agar Pemerintah melakukan evaluasi terhadap besaran tarif PPh Badan serta tarif PPN. Sebagai perbandingan, *tax reform* yang sedang dilakukan Amerika Serikat ditujukan untuk membangkitkan kembali ekonomi domestiknya sekaligus memperbesar minat investasi ke AS. Apabila AS kini mulai beralih ke kebijakan *inward looking* untuk mendukung industri, investasi, dan ekonominya, maka APINDO tentunya mempertanyakan komitmen serupa Pemerintah untuk mendukung dunia usaha domestik, salah satunya melalui kebijakan perpajakan yang ramah investasi dan pro pengembangan usaha. Di kawasan, Singapura juga menyesuaikan tarif PPh Badan ke level yang lebih rendah. Oleh karena itu, APINDO berpandangan agar pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan serupa terhadap tarif PPh Badan yang saat ini masih berada di atas 20%, sehingga dunia usaha Indonesia semakin berdaya saing. APINDO juga meminta agar dilibatkan dalam proses revisi UU KUP, revisi UU PPh, UU PPN serta mengenai pengadilan pajak. Diharapkan proses revisi dan perampungan ketiga UU terkait perpajakan tersebut agar dapat segera terselesaikan di awal 2018. Bila Pemerintah mengalami kesulitan di dalam mengandalkan revisi ketiga UU di bidang perpajakan tersebut, APINDO merekomendasikan agar Kemenkeu RI berinovasi lebih lanjut melalui instrumen PP atau Permen. Revisi terhadap tiga UU di bidang perpajakan itu juga agar diikuti perbaikan

administrasi perpajakan serta peningkatan kapasitas dan integritas aparat pajak untuk peningkatan kualitas pelayanan sehingga meminimalisir sengketa dan kebocoran pajak, dan pada akhirnya Pemerintah dapat mencapai penerimaan perpajakan yang semakin meningkat secara *high compliance* tanpa membebani kinerja dunia usaha.

Melanjutkan upaya APINDO untuk perbaikan kualitas kebijakan usaha di tahun 2017, APINDO akan terus melakukan advokasi untuk perbaikan kebijakan di tahun 2018, beberapa diantaranya terkait Rencana Revisi UU Persaingan Usaha agar KPPU tidak menjadi *super body*; implementasi UU Produk Halal agar tidak salah arah dan justru merugikan perekonomian nasional; *judicial review* UU Pajak dan Retribusi Daerah di MK untuk menghapuskan jenis pungutan yang tidak semestinya, penggantian UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 yang ternyata belum masuk di dalam daftar Prolegnas prioritas 2018, dan lain sebagainya.

Selain kebutuhan mutlak terhadap penggantian payung hukum UU Ketenagakerjaan, terdapat empat aspek lainnya yang juga menjadi fokus APINDO di 2018 yang berkaitan erat dengan perbaikan regulasi-regulasi di bidang hubungan industrial, diantaranya upaya mempertahankan dan memperluas lapangan kerja, Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), perijinan tenaga kerja, serta pendidikan vokasi dan pemagangan. APINDO tetap sepenuhnya mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pemagangan. Selain mendukung deklarasi pemagangan nasional bersama Presiden, Kemenaker dan Kadin Indonesia, APINDO telah menerbitkan buku Panduan Pemagangan dan laporan studi *best practices* pemagangan, serta buku panduan pengembangan ketrampilan untuk siap kerja di beberapa bidang seperti: otomotif dan retail. Diperlukan sinergi kuat antara dunia usaha, pemerintah dan dunia pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kurikulum pendidikan vokasi dan kualitas pengajar harus disesuaikan dengan kebutuhan industri – yang didukung dengan sarana prasarana pelatihan yang memadai dengan optimalisasi pemanfaatan bersama fasilitas fasilitas swasta dan pemerintah.

APINDO juga akan terus mengawal rancangan-rancangan legislasi di 2018 agar dapat

menghasilkan produk hukum yang mampu menopang iklim dunia usaha yang sehat. Pembentukan UU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, revisi UU Persaingan Usaha yang Sehat yang masih berjalan, PP Jaminan Produk Halal, dan PP Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) menjadi daftar prioritas Tim Ahli APINDO untuk dicermati agar tidak bertentangan dengan mandat dan rekomendasi dunia usaha, agar tidak melampaui ketaatan regulasi – demi menjamin kelangsungan dan perkembangan bisnis.

APINDO telah memberikan masukan kepada Pemerintah dalam beberapa hal. Pertama, agar pejabat publik mengurangi berbagai polemik yang terpublikasi belakangan ini. Polemik yang terjadi menjadikan dunia usaha dan investor semakin berhati-hati dan pesimis, terutama memasuki tahun politik 2018. Kedua, agar Pemerintah melanjutkan pemberian insentif kepada dunia usaha terutama di sektor padat karya. Pengusaha dan investor yang enggan berinvestasi di industri padat karya dikarenakan tingginya Upah Minimum. Hal ini menyebabkan tenaga kerja formal mulai menyusut, dan beralih ke informal, sehingga pada akhirnya menunda pembelian / konsumsi. Ketiga, Pemerintah diharapkan meningkatkan proporsi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dan pendalaman industri industri prioritas. Hal tersebut untuk memperkuat industri nasional yang berdaya saing tinggi. Berikutnya, Presiden diharap mengingatkan kepada jajaran menteri untuk lebih menonjolkan optimisme pertumbuhan ekonomi, bukan justru berlomba-lomba mempublikasikan berbagai pencapaiannya. APINDO mencermati bahwa Presiden sudah berkomunikasi secara optimis, namun beberapa pembantunya seringkali hanya “*mencari panggung*”, yang menimbulkan kecemasan dunia usaha.

Sebagai catatan akhir, ikhtisar pandangan dan sumbang pikir yang saya nyatakan tersebut di atas untuk 2018 selalu mengedepankan sinergi dengan seluruh *stakeholders* APINDO, dalam kerangka optimisme yang tidak pernah pudar. Apabila optimisme yang selalu dijaga dunia usaha tidak dibarengi dengan sinergi yang memadai dengan Pemerintah, Pekerja, maupun *stakeholders* APINDO lainnya, maka akan mustahil negara kita di 2018 untuk mampu menjauhi siluet kelesuan ekonomi yang menghinggapi di tahun-tahun terakhir bahkan hingga 2017 lalu.

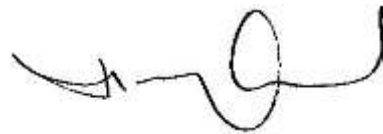
Bersama ini saya secara pribadi dan organisasi mengucapkan terima kasih kepada ribuan perusahaan anggota APINDO di seluruh Indonesia, termasuk asosiasi-asosiasi sektoral beserta mitra-mitra APINDO di pusat dan daerah, yang terus setia berjalan beriring bersama kami hingga memasuki tahun 2018 sekaligus mempercayakan mandatnya kepada kami dalam memperjuangkan kepentingan dunia usaha nasional, serta tentunya tidak terlepas dari dukungan finansial yang diberikan. APINDO akan selalu berkomitmen untuk menjadi partner strategis Pemerintah secara berkesinambungan, sehingga kami dapat memenuhi komitmen dan tanggung jawab kami dalam melayani perusahaan anggota APINDO maupun dunia usaha Indonesia secara keseluruhan.

Secara khusus, saya menyambut gembira terhadap terbentuknya PAMI (Pusat Arbitrase dan Mediasi Indonesia) di tahun 2017, sebagai bentuk komitmen APINDO dalam menjunjung tinggi kesamaan hak dan keadilan bagi para pencari keadilan dengan struktur kelembagaan dan susunan tenaga arbiter dan mediator yang objektif, kredibel, profesional dan independen. Saya berharap dengan berdirinya PAMI akan dapat memberikan kontribusi dalam alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan di Indonesia dalam bidang perdagangan, perindustrian dan sektor keuangan yang sangat menentukan bagi kemajuan perekonomian Nasional sehingga Indonesia dapat bersaing secara internasional khususnya di tingkat ASEAN dalam bidang bisnis. Di saat yang bersamaan, saya terus mendorong agar IPC (*International Partnership Center*) yang telah dibentuk APINDO terlebih dahulu sebelum PAMI berdiri, dengan harapan bahwa melalui bertambahnya usia IPC akan berperan lebih besar dalam menarik masuk investasi asing melalui berbagai upaya *business match making*, pelayanan informasi kebijakan dan berbagai bentuk fasilitasi investasi untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi Indonesia.

Akhir kata, kepemimpinan yang saya jalankan di APINDO telah memasuki tahun ke-4 seiring dengan dimulainya lembaran tahun 2018. Saya mengapresiasi sekaligus tetap mengharapkan keberlanjutan kerjasama dan dukungan sepenuhnya dari segenap jajaran Pengurus dan Sekretariat DPN APINDO, DPP dan DPK APINDO seluruh Indonesia, serta dukungan dari seluruh mitra-mitra APINDO yang selalu setia

berjalan beriring bersama kami dalam berbagai kondisi dan dinamika yang ada. Di tahun 2018 juga APINDO akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) untuk memilih kepemimpinan nasional APINDO periode 5 tahun mendatang yang saya yakin akan terselenggara dengan baik atas dukungan para pimpinan APINDO dari seluruh 34 provinsi. Saya selalu optimis bahwa peran besar APINDO pada tahun-tahun sebelumnya akan semakin menguat di tahun 2018 melalui sumbang pikiran dan rekomendasi kepada Pemerintah, agar cita-cita besar bangsa ini dapat terwujud melalui komitmen dan kerja kita bersama.

Terima kasih.



Hariyadi B. Sukamdani
Ketua Umum DPN APINDO